

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku :

- Abraham H. Maslow, 2010, *Motivation and Personality*, Rajawali, Jakarta.
- Eugene F. Brigham & Joel F. Houston, 2001, *Manajemen Keuangan*, PT. Erlangga. Jakarta.
- Fitriya Fauzi, Abdul Basyith Dencik & Diah Isnaini Asiati, 2019, *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*, Salemba Empat, Palembang
- Ihyaul Ulum, 2008, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang, Umm Press.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta, Andi.
- Martono & Agus Harjito, 2001, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, Ekonisia.
- Sunarjo S. Djoenaesih dan Sunarjo, *Istilah Komunikasi, Edisi 2*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Taliziduhu Ndraha, 2005, *Kybernologi : Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta.

### Publikasi :

- Ai Nur Dini Rosita, 2018. *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak*, Equity Volume 4 Issue 2.
- Ati Kusmiati, 2017, *Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak*. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia

Frima Satria Anjasmara, Edy Sujana & I Gusti Ayu Purnamawati, 2017, *Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak pada KPP pratama singaraja*, e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8, No. 2

Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti & Danang, 2018, *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu*, Dinamika Sosial Budaya, Vol 20, No. 2, Desember 2018

Tessa Putri Wandira & Fatahurrazak, 2017, *Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama tanjung pinang*, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Peraturan Pemerintah :

Depdagri, 1997, Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke Empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, Departemen Keuangan, Jakarta.

Republik Indonesia, 2000, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997*, Departemen Keuangan, Jakarta.

Republik Indonesia, 2000, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997*, Departemen Keuangan, Jakarta.

Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Departemen Keuangan, Jakarta.

Tulisan belum dipublikasi :

Ari Sumantri & Emi Suwarni, 2019, '*Strategi Account Representative Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur)*', Universitas Bina Darma, Palembang. (Belum dipublikasikan)

Eko Sulistyo Kurniawan & Abdul Basyith, 2019, '*Pemanfaatan Aturan Debt To Equity Ratio dalam Menambah Penerimaan Pajak*', Universitas Bina Darma, Palembang, Kinerja. (Belum dipublikasikan)